



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-1  
MASA SIDANG I - TAHUN SIDANG 2006-2007**

**Gedung Nusantara V, 14 Agustus 2006**

**1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-1**

**Masa Sidang I Tahun 2006-2007**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Om Swastiastu,*

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna DPD Ke-1 Masa Sidang I ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK 1 X**

**2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-1 DPD Tahun Sidang 2006-2007**

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-1 DPD ini mempunyai 4 (empat) agenda pokok yaitu:

- Pembukaan Masa Sidang I DPD Tahun Sidang 2006-2007, dengan penyampaian Pidato Pembukaan oleh Pimpinan DPD;
- Penyerahan Laporan Tertulis Sekretaris Jenderal Tentang Pelaksanaan Tugas Selama Tahun Sidang 2005-2006;
- Pengesahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2006-2007; dan
- Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari masing-masing Provinsi.

**3. Mengheningkan Cipta**

Hadirin yang kami muliakan, Sidang Paripurna DPD kali ini diselenggarakan pada saat bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-61. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki

agenda pokok Sidang Paripurna I DPD ini, kami ingin mengajak kita semua untuk mengheningkan cipta sejenak mengenang jasa para Pahlawan Kusuma Bangsa yang telah mengantarkan kita semua memasuki alam kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan, seraya memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam memasuki enam puluh satu tahun kemerdekaan; serta berdoa, semoga arwah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya. Kita mohon pula kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang begitu berat, semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengemban amanah rakyat, membangun bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. **MENGHENINGKAN CIPTA, MULAI!**

## LAGU MENGHENINGKAN CIPTA

Mengheningkan Cipta selesai.

Sebelum kita melangkah pada Agenda selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita ke depan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah serta berdoa bagi kawan-kawan kita Anggota DPD yang telah mendahului kita yaitu Saudara Drs. H Abdul Halim Harahap, Raja Inal Siregar, Drs. H. Yokoyama Sinapoy dan H. Abi Kusno Nachran. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Saudara.....

## PEMBACAAN DOA

#### 4. Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPD Tahun 2006-2007.

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki Masa Sidang I Tahun 2006-2007.

#### Sidang Dewan yang mulia,

- Beberapa hari memasuki masa anggota DPD melakukan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, kita kembali berduka cita setelah DPD kehilangan lagi seorang anggota dengan meninggalnya Saudara H. Abi Kusno Nachran pada hari Senin tanggal 24 Juli 2006 yang lalu akibat kecelakaan di wilayah Cirebon. P.R.A. Arief Natadiningrat, Anggota DPD dari Jawa Barat yang juga berasal dari Cirebon telah membantu keluarga dalam penyelesaian segala hal yang berkenaan dengan jenazah almarhum sampai diberangkatkan ke Semarang Jawa Tengah tempat asal keluarga almarhum. Saat Almarhum disemayamkan di Semarang, Ketua PAH II Saudara Ir. Sarwono Kusumaatmadja didampingi Anggota DPD yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Saudara Ir. H. Budi Santoso dan Saudara Drs. H. Sudharto, M.A. mewakili DPD menerima dan melepas Almarhum untuk kemudian dimakamkan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Kita doakan semoga Almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni segala kesalahan dan dosanya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan keteguhan dan ketabahan.

Atas nama DPD kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala darma bakti dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Almarhum H. Abi Kusno Nachran selama ini kepada Bangsa dan Negara.

- Suasana duka dan keprihatinan menyelimuti pula bangsa kita yang sedang mengalami cobaan dengan berbagai bencana alam yang terus melanda. Yang terkini adalah gempa bumi berkekuatan 6.8 SR yang berpusat di Samudera Indonesia (sekitar 260 km sebelah selatan Bandung) telah memicu tsunami yang memporak porandakan pantai selatan Jawa (segmen Tasikmalaya-

Pangandaran-Cilacap-Kebumen) dengan jumlah korban jiwa mencapai lebih 500 orang. Belum lagi semua masalah sebagai dampak bencana alam tersebut selesai ditanggulangi, Gunung Karangetang di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara juga meletus, menyemburkan awan panas dan memuntahkan lava pijar. Ditambah lagi dengan gempa bumi yang kembali mengguncang Gorontalo, Sulawesi pada tanggal 24 Juli 2006 dengan kekuatan 6,6 Skala Richter.

- Berkenaan dengan berbagai bencana tersebut, Pimpinan dan anggota DPD telah berkunjung ke wilayah bencana dan melihat dari dekat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita tersebut.
- Berbagai kejadian bencana alam tersebut menunjukkan dahsyatnya suatu bencana alam itu yang terjadinya begitu cepat dan sulit diperkirakan sebelumnya, sehingga manusia hampir tidak mempunyai makna dibanding kekuatan alam itu. Oleh karena itu, kita semua harus berupaya untuk dapat mengenali fenomena alam dan memelihara lingkungan anugerah Tuhan kita, dan secara khusus berharap agar Pemerintah semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi dan dalam manajemen penanggulangan bencana alam. Dalam upaya ini DPD siap membantu Pemerintah.
- Dalam penyampaian hasil kegiatan di daerah pemilihan masing-masing yang nanti akan kita dengarkan bersama, kami mengharapkan kepada Saudara-saudara, khususnya para anggota DPD yang daerahnya terkena musibah bencana alam, dapat melaporkan kondisi di daerah masing-masing. Selanjutnya kami mengharapkan, dalam ruang lingkup kewenangan DPD, melalui alat kelengkapan dapat membahas strategi dan upaya-upaya konkret berkenaan dengan penanganan musibah bencana alam tersebut.
- Terkait dengan RUU tentang Penanggulangan Bencana yang kini sedang dibahas di DPR, beberapa waktu yang lalu DPD telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU tersebut. Berkenaan dengan itu, kami mengharapkan alat kelengkapan yang membidangi masalah tersebut yakni PAH II dapat memantau perkembangan pembahasannya apakah telah sejalan dengan pandangan dan pendapat DPD.

### **Sidang Dewan yang kami muliakan,**

- Masalah lain yang perlu mendapat perhatian dari DPD adalah mengenai pemekaran daerah. Mendagri menginformasikan bahwa 80% pemekaran daerah di berbagai wilayah telah menimbulkan permasalahan antara lain menyangkut batas wilayah, cakupan wilayah, penentuan ibukota dan aset daerah. Oleh karena itu, kami harapkan dalam pemekaran daerah di samping harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat serta mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan daerah itu sendiri. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan lingkup tugasnya PAH I yang pada tahun sidang ini akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa pemekaran daerah kiranya dapat dilakukan secara komprehensif untuk menghindari dan meminimalisir kemungkinan konflik di masa yang akan datang.
- Terkait masalah revisi Undang-Undang Pokok Agraria, penataan ulang mengenai kebijakan agraria ini dirasa sangat penting karena UU Pokok Agraria merupakan suatu produk hukum yang telah berusia sekitar 46 tahun. Idealnya suatu produk hukum ditinjau ulang paling lama setiap 10 tahun guna disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan global, dan dalam hal ini dalam konteks prinsip otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani. Di samping itu, Undang-Undang Agraria perlu menjamin kepastian hukum yang berlandaskan keadilan untuk penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.
- Permasalahan lain yang juga merupakan fokus perhatian PAH I adalah mengenai masalah revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi masalah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah antara lain adanya kelemahan aturan main dan manajemen dalam pelaksanaan pilkada langsung; belum selesainya

penyusunan berbagai perangkat peraturan pelaksanaannya; kurang intensifnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pilkada; serta disinyalir adanya upaya untuk melakukan resentralisasi. Oleh sebab itu revisi UU Nomor 32 tahun 2004 dipandang perlu. Namun demikian mengingat baru 3 tahun UU tersebut disahkan maka sebelum merevisi UU tersebut perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam agar jangan sampai justru merugikan masyarakat dan daerah.

- Masalah lain yang perlu terus menjadi perhatian PAH I dalam tahun sidang ini adalah masalah rekrutmen CPNS daerah yang berasal dari tenaga honorer. Tenaga honorer tersebut selama ini telah bekerja mengabdikan diri, oleh karena itu sudah selayaknya dapat diprioritaskan untuk diangkat sebagai PNS tanpa harus mengikuti sepenuhnya proses penerimaan pegawai pada umumnya. Dalam penyelesaian masalah ini perlu terus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Terkait dengan pemberdayaan pelabuhan di daerah melalui upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran dengan memisahkan pengaturan tentang kepelabuhanan ke dalam undang-undang tersendiri yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta daerah. Berkenaan dengan itu, dalam Sidang Paripurna yang lalu DPD telah mengesahkan RUU tentang Kepelabuhanan yang merupakan hasil kerja PAH II dengan catatan masih perlu dikoordinasikan dengan PPUU untuk mengharmonisasikan rumusan dalam RUU tersebut. Untuk hal ini kami mengharapkan kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama RUU tersebut sudah dapat dituntaskan agar segera kita sampaikan kepada DPR dan juga kepada Pemerintah untuk diproses lebih lanjut.
- Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, terdapat aspek penting yang dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, antara lain melalui pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu bagian dalam sistem keuangan nasional.

DPD memandang bahwa pemberdayaan LKM dengan memberikan kredit kecil (*micro credit*) akan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kita sekarang ini karena objek dari LKM adalah lapisan masyarakat yang ditinjau dari besaran pendapatannya termasuk masyarakat miskin, namun mereka masih mempunyai kemauan untuk melakukan usaha produktif. Usaha mikro sebagai bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, DPD perlu berinisiatif mengajukan usul RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Untuk itu kiranya PAH II hendaknya terus mengintensifkan pembahasan mengenai hal ini berkoordinasi dengan PAH IV.

- Masalah pendidikan yang merupakan bagian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa telah menjadi salah satu fokus utama DPD. Dalam hal pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN/APBD sesuai dengan amanat konstitusi, DPD memandang bahwa tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk mengupayakannya agar dapat memenuhi amanat tersebut.

Sementara itu, masalah pendidikan yang menyangkut penetapan Ujian Nasional sebagai kriteria utama kelulusan, dipandang telah mereduksi makna pendidikan sebagai sebuah proses pematangan pribadi yang mencakup pengembangan kognitif, afeksi, mental dan kepribadian. Hal itu dipandang pula telah menciderai hak konstitusional pendidik yang diberikan Undang-Undang guna melakukan evaluasi belajar peserta didik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini sebagaimana hasil Sidang Paripurna yang lalu DPD sepakat untuk menolak bahwa Ujian Nasional yang dijadikan satu-satunya dasar penentu kelulusan peserta didik. Mengenai hal-hal tersebut di atas kiranya PAH III dapat memantau perkembangan tindaklanjutnya.

- Masalah lain yang perlu terus menjadi perhatian DPD adalah menyangkut daerah konflik, rawan konflik, dan pasca konflik. Konflik dan aksi kekerasan yang juga masih kerap terjadi di beberapa daerah termasuk di Tanah Papua menjadi keprihatinan kita semua. Permasalahan di Tanah Papua ini telah ditangani secara khusus oleh DPD melalui Pansus Papua. Mengingat masalah ini dirasakan cukup mendesak, maka kami harapkan kiranya pansus yang dibentuk pada tanggal 28 Maret 2006 ini dapat segera menyelesaikan tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna DPD berikutnya.

- Selanjutnya, berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini DPD memandang perlu untuk melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam atas masalah-masalah DKI Jakarta, dan perlu melakukan pengamatan yang mendalam tentang cita ideal kota metropolitan. Dalam rangka itu DPD telah membentuk Panitia Khusus DKI Jakarta yang diharapkan dapat membantu upaya merealisasikan kota metropolitan yang ideal. Kami harapkan kiranya pansus yang telah bekerja selama lima bulan ini dapat segera menyelesaikan tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD pada bulan September yang akan datang.

- Upaya kita untuk memperoleh dukungan riil dari berbagai pihak termasuk para pemangku pembangunan di daerah dan anggota DPR RI agar DPD dapat berperan secara optimal dalam proses penguatan demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia, kita percayakan untuk dipelopori oleh kelompok DPD di MPR, namun dengan dukungan semua Anggota DPD.

Sasarannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan anggota DPR perlu dilakukan pula dengan lebih intensif untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan usul perubahan konstitusi.

Sambil melakukan upaya tersebut, kitapun harus terus bekerja keras dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas sesuai dengan amanat konstitusi yang tercermin dari kuantitas dan kualitas produk yang kita hasilkan.

- Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas DPD RI untuk memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang APBN sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD*", maka pada tanggal 23 Agustus 2006 mendatang DPD RI akan menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda Pidato Presiden RI tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun 2007. Pelaksanaan acara ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun 2005 yang lalu dapat diselenggarakan dengan sukses. Dengan demikian, acara ini akan menjadi suatu konvensi ketatanegaraan kita yang setiap tahun diselenggarakan.

Pidato yang akan disampaikan oleh Presiden tersebut merupakan bahan berharga bagi DPD dalam memberikan pertimbangan atas RAPBN Tahun 2007 dan mengingat substansi pidato Presiden menyangkut pembangunan daerah, maka pada Sidang Paripurna Khusus DPD akan hadir para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kehadiran para pemangku pembangunan di daerah ini terkait pula dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Di samping para pimpinan daerah, DPD juga akan mengundang organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu mereka yang berkepentingan dengan perkembangan demokrasi, selain tentunya berkepentingan pula terhadap pembangunan daerah, sehingga secara bersama-sama, dengan mengambil manfaat dari pidato Presiden, seluruh kekuatan bangsa dapat mendukung upaya peningkatan kemajuan daerah sebagai bagian esensial dari kemajuan nasional.

- DPD RI mengharapkan kiranya materi pidato Presiden yang akan disampaikan pada acara tersebut selain memuat tentang rencana pembangunan daerah dalam APBN Tahun 2007, Presiden juga dapat menyampaikan hasil-hasil pembangunan daerah dalam APBN Tahun 2006 yang lalu.

- Sidang Paripurna Khusus tersebut akan diselenggarakan dengan sederhana tetapi khidmat dan dengan menjaga martabat, kehormatan serta kewibawaan kedua lembaga negara, yaitu lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Daerah.

- Dalam rangkaian acara Tanggal 23 Agustus 2006 di agendakan berbagai kegiatan untuk mengaktifkan kehadiran para Kepala Daerah di Jakarta. Pertama pada 22 Agustus malam akan diselenggarakan pertemuan dengan para Gubernur dalam rangka memantapkan kerjasama DPD dengan APPSI dan dalam rangka sosialisasi amandemen Undang-undang Dasar 1945. Kedua,

setelah Sidang Paripurna 23 Agustus 2006, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri atas undangan DPD akan memberi penjelasan lebih rinci mengenai RAPBN 2007 yang berkenaan dengan daerah di muka para Gubernur dan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka acara 23 Agustus 2006 ini dikoordinasikan oleh Panitia Penyelenggaraan Sidang Paripurna Khusus DPD.

#### 5. **Acara Kedua, Penyerahan Laporan Tertulis Sekretaris Jenderal Tentang Pelaksanaan Tugas Selama Tahun Sidang 2005-2006.**

- Dukungan kesekretariatan yang efektif kepada sebuah lembaga negara apalagi lembaga negara baru seperti DPD sangat diperlukan. Pelayanan teknis dan administratif yang selama ini diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD telah kita rasakan bersama. Meskipun kita rasakan juga di sana-sini masih ada kekurangan, namun pada umumnya Sekretariat Jenderal telah membantu tugas-tugas DPD maupun para Anggota DPD secara perorangan dengan cukup baik, sehingga memungkinkan DPD berfungsi dan mencapai apa yang kita usulkan selama ini. Dan untuk itu sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi.
- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 173 huruf e Peraturan Tata Tertib DPD, bahwa *“Tugas Sekretariat Jenderal adalah melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada pimpinan DPD pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam Sidang Paripurna”*, selanjutnya kepada Saudara Sekretaris Jenderal kiranya dapat menyerahkan Laporan Tertulis Pelaksanaan Tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan dalam Sidang Paripurna ini. Kami persilakan.

### **PENYERAHAN LAPORAN TERTULIS OLEH SEKRETARIS JENDERAL DPD (TIDAK DIBACAKAN)**

- Laporan Sekretariat Jenderal MPR/DPD yang telah disampaikan tadi kami harap untuk dipelajari oleh PURT, sebagai bahan untuk menyempurnakan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan.

#### 6. **Pengesahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2006-2007.**

- Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPD, keanggotaan di masing-masing alat kelengkapan DPD mencerminkan keterwakilan masing-masing provinsi. Setiap anggota DPD harus menjadi anggota salah satu Panitia Ad Hoc kecuali Pimpinan DPD dan Pimpinan MPR unsur DPD.

Perlu kami sampaikan bahwa penempatan anggota DPD dari setiap provinsi di alat-alat kelengkapan DPD didasarkan atas kesepakatan dan ditandatangani oleh anggota dari provinsi yang bersangkutan kemudian disampaikan ke Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Jenderal belum *seluruh provinsi telah menyampaikan daftar nama anggota untuk duduk di alat kelengkapan DPD*. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini Kami menyarankan Sidang Paripurna DPD mengesahkan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2006-2007 dari Provinsi-provinsi yang telah mengajukan daftar nama para anggota di masing-masing Alat Kelengkapan. Bagi Provinsi-provinsi yang belum mengajukan kita harapkan sudah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal sebelum pukul 10.00 tanggal 15 Agustus 2006 untuk disahkan dalam Sidang Paripurna lanjutan besok. Provinsi-provinsi tersebut adalah ....., ..... dan ..... Selanjutnya dapatkah Sidang Paripurna ini mengesahkan

anggota Alat-alat kelengkapan yang daftar nama-namanya telah disampaikan oleh masing-masing provinsi, kecuali dari ..... Provinsi tersebut?

## KETUK 2 X

### 7. **Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.**

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing Provinsi adalah 5 sampai 10 menit. Laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Laporan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna ini cukuplah *highlight*-nya saja. Selanjutnya Pimpinan DPD akan menugaskan Sekretariat Jenderal, untuk mengolah laporan tersebut dan meneruskannya kepada alat-alat kelengkapan DPD sesuai dengan bidang masing-masing untuk ditindaklanjuti.

## PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL KEGIATAN DI DAERAH DARI WAKIL SETIAP PROVINSI

### 8. **Sidang Paripurna ke-1 DPD diskor**

- Oleh karena masih ada beberapa Provinsi yang belum menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan, maka Sidang dilanjutkan besok jam 10.00 WIB.
- Sebelum Sidang diskors, perlu kami sampaikan pula bahwa besok pukul 10.00 WIB, sebelum kita memulai Sidang Paripurna lanjutan untuk mendengar laporan hasil kegiatan di daerah, kita akan melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPD dan KPK yang telah kita sepakati dalam Sidang Paripurna ke-16 masa sidang IV Tahun Sidang 2005-2006 yang lalu di ruangan ini. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran anggota DPD tepat pada waktunya.
- Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna ke-1 kami skors.  
*Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.*

## KETUK 2X

----- SIDANG PARIPURNA DI SKOR -----